

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan:

1. Subtansi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai peraturan pelaksana pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan menyebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah, karena judul dari Peraturan Pemerintah tersebut bersifat khusus tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018.
2. Implikasi hukum diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah kegiatan penduduk disuatu wilayah dibatasi seperti:
  - a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
  - b. Kegiatan Keagamaan;
  - c. Kegiatan di tempat dan/atau fasilitas umum.

Kendala-kendala dalam penegakkan hukum yaitu kendala struktur, kendala substansi, dan kendala kultur (budaya hukum).

- a. Kendala struktur

Kendala struktur yang dimaksud disini mencakup dua hal yaitu kelembagaan hukum dan aparatur hukum.

b. Kendala Substansi

Kendala substansi sering dijumpai substansi hukum di Indonesia yang bermasalah karena tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya, nilai-nilai moral Pancasila, maupun nilai universal. Sebagai contoh dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Pasal 60 yang menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun dalam peraturan pelaksanaannya hanya mengatur kriteria pembatasan sosial berskala besar secara khusus.

c. Kendala kultur (budaya hukum)

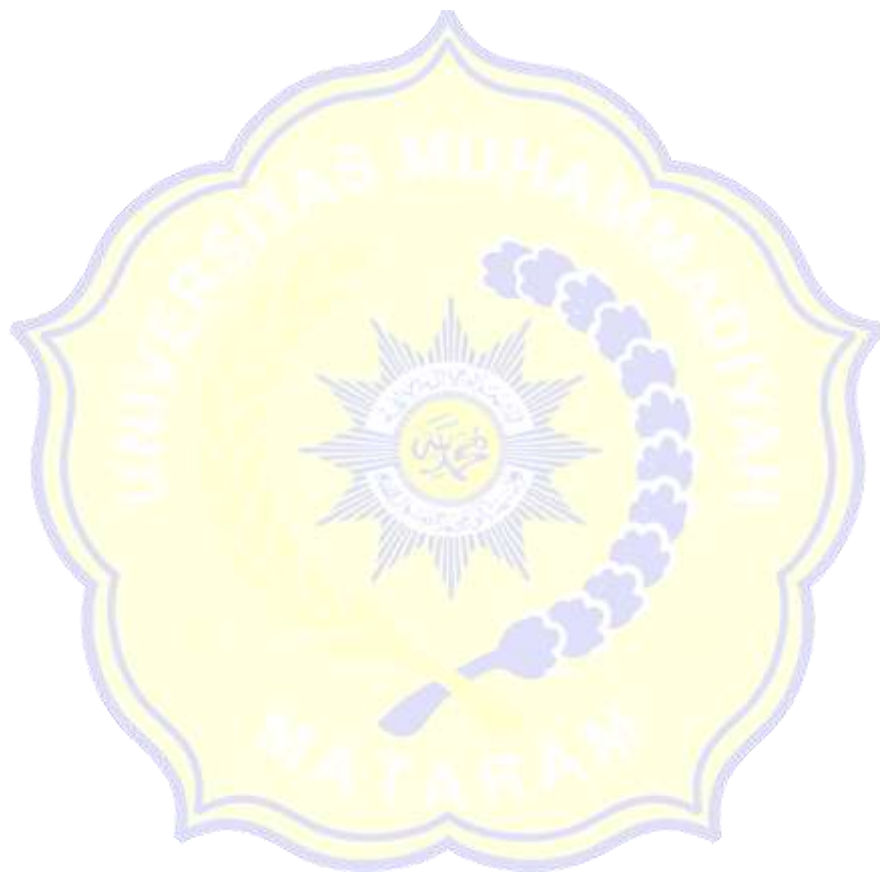
Dalam penegakkan hukum salah satu unsur yang penting adalah budaya hukum. Budaya hukum ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan hukum masyarakat. Untuk meningkatkan budaya sadar hukum bagi masyarakat seharusnya sosialisai peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara intensif.

**B. Saran**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis dapat merekomendasikan sebagai berikut:

1. Dalam Pembuatan Peraturan Pemerintah hendaknya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Implikasi hukum jika Peraturan Pemerintah tidak sesuai dengan Undang-Undang yang diatasnya maka dapat di judicial review ke Mahkamah Agung.





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**  
**TERAKREDITASI**

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

**KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI**

NAMA : NILA RAUDATUL JANNAH  
NIM : 06010061  
PROG. STUDI : ILMU HUKUM  
IPK : 342  
DOSEN PS I : ANIES PRIMA DENDAH DOSEN PS II : ADY SUPRYADI, ST, MH.

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
	29/09/20	Perbaikan pada pendahuluan, tinjauan pustaka		<i>[Signature]</i>
	29/09/20	Perbaikan pada metode penelitian		<i>[Signature]</i>
	06/10/20	ACC Proposal	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	16/10/20	Perbaikan pada pembahasan tentang implikasi dari PP no. 24 th 2020	<i>[Signature]</i>	
	20/10/20	Perbaikan pada kesimpulan & saran	<i>[Signature]</i>	
	22/10/20	ACC Skripsi	<i>[Signature]</i>	

Mengetahui  
Dekan Fakultas Prodi,  
*[Signature]*  
2020  
Fakultas Hukum  
2020  
G305.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Literatur

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, 2006, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet I*, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Atamimi, A, Hamid S, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Rpublik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintah Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bagir Manan, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press).
- Farida Maria, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Jimly Asshidqie, 2014, *Prihal Undang-Undang*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- King Faisal Sulaiman, 2017, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, 2017.
- Kelsen Hans, 2009, *General Theory of Law and State, Translated by Anders Wedberg*, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2006, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta.
- Rawls, John, 1999, *Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998 *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm. 18,

Taufiqurokhman, 2014, *Kebijakan Publik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), Jakarta Pusa.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53: Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4389

Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82: Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

Permenkes No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

## **C. Jurnal/Wibsite**

[www.Radarbali.com](http://www.Radarbali.com) diakses tanggal 20 Mei 2020. Pukul 14.39 WITA

Aprista Ristyawati, *“Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

Adiministrative Law & Governance Journal. Vol. 3 Issue, June 2020.

[www.pshk.or.id/publikasi](http://www.pshk.or.id/publikasi) 2 April 2020 diakses pada tanggal 18 Juni 2020. Pukul 11.55 WITA.

<https://www.ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses tanggal 19 Juni 2020 Pukul 19.43 WITA.



Penjelasan dan Pendapat Fajri, Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) Indonesia, diakses pada tanggal 13 juli 2020 Pukul 14.45 WITA.

Prianter Jaya Hairi, *“Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19 Vol. XII, No. 7 April 2020.*

Kompas, 1 April 2020, *Mari Patuhi Pembatasan Sosial* diakses pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 15. 35

Lppm.Unpam.ac.id diakses pada tanggal 13 Juli 2020. Pukul 20.35 WITA

Media Indonesia 1 April 2020, *Fase Baru Pembatasan Sosial* diakses pada tanggal 16 Juli 2020 Pukul 14.25.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses pada tanggal 13 Juli 2020. Pukul 14.08 WITA

